

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT)

DI DKI JAKARTA



Disusun Oleh :

Nurina, ST., MM

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU(PKT) DI DKI JAKARTA**
2. Ketua Tim Peneliti Pengusul
- a. Nama Lengkap : Nurina, ST., MM
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0331127804
 - d. No Sertifikat : 19103102002349
 - e. Fakultas/Home Base : Teknik / Teknik Industri S-1
 - f. Pusat Penelitian : Universitas Persada Indonesia YAI
 - g. HP/Telp : +62 815-8732-488

Jakarta, 18 Agustus 2020
Ketua Tim Peneliti

Menyetujui
Ka. Unit LPPM
Fakultas Teknik UPI YAI



Nurina, ST., MM



Nurina, ST., MM

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Teknik UPI YAI



Dr. Ir. Fitri Suryani, MT

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DI DKI JAKARTA

Abstrak

Pembinaan yang dilakukan merupakan Pengabdian Masyarakat pada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di PEMDA DKI. Tujuan Pembinaan diawali dengan kajian program yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja usaha serta mempersiapkan UKM untuk naik kelas. Bentuk pembinaan melalui proses yang disebut P1 sampai dengan P7 merupakan tahapan kegiatan dimulai dengan, pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perijinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6) dan Permodalan (P7).

Pelaksanaan pembinaan melalui proses 7 tahapan tersebut, dimana setiap proses tahapan harus diikuti oleh peserta UMKM yang dibina dan diharapkan selesai dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Sub sistem dari Pembinaan (P1-P7) diperlukan pendampingan, yang mempunyai kompetensi pendamping kewirausahaan dari BNSP dan berijazah Sarjana 1. Dengan demikian keberhasilan dari program ini juga terletak dari peran individu pendamping dalam memotivasi, serta menjadi narasumber dan fasilitator bagi UMKM yang menjadi binaannya.

Hasil pembinaan menunjukkan bahwa manfaat dan keberhasilan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), bukan hanya terletak pada besarnya jumlah peserta pada tahap P1 dan P2. Tetapi bagaimana memberikan wawasan bisnis dan motivasi usaha yang disampaikan secara kontinyu melalui supervisi yang dilakukan sehingga peserta program berhasil sampai dengan proses P7. Hasil yang ditunjukkan melalui penilaian tangguh dan mandiri, tidak mengalami peningkatan yang diinginkan dari lima indikator yang diamati.

Hal ini menjadi satu simpulan dan saraan, bahwa pembinaan melalui proses P1 sampai P7 perlu dilakukan perubahan sistem, dengan menambah satu proses pembinaan dalam rangka peningkatan daya saing usaha.

Kata kunci : Pembinaan, Pelatihan, pendampingan,

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang/Analisis situasi

Kemakmuran sebuah negara terletak pada seberapa banyak jumlah wirausaha yang dimiliki untuk menggerakkan roda perekonomian negara, sehingga semakin banyak jumlah wirausaha, maka semakin dikatakan negara tersebut mencapai kemakmuran. Secara umum sebuah negara dapat mencapai kemakmuran apabila jumlah wirausaha minimal sebanyak 2% dari total penduduk di negara tersebut.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral terutama dalam perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja walaupun mereka mengalami kendala/kesulitan terutama dalam hal permodalan, produksi, pemasaran dan manajemen bisnis. Dengan peran yang diembannya tersebut, sudah seharusnya mereka mendapat prioritas, mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah/Pemda melalui BUMN/BUMD, dari pihak swasta maupun dari perguruan tinggi berdasar fungsi yang masing-masing emban.

Secara keusahaan kondisi usaha kecil masih relatif lemah, masih terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada. Kondisi usaha kecil dan koperasi yang demikian disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki terutama pada :

- Kemampuan pengelolaan usaha
- Keterbatasan modal kerja
- Kelangkaan akan sarana – sarana yang dimiliki

Dengan keterbatasan diatas, maka sulit bagi pengusaha kecil dan koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemda DKI Jakarta membuat sebuah model pengembangan kewirausahaan yang disebut Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang bertujuan untuk menciptakan sejumlah 200.000 wirausaha di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan sebuah kegiatan pembinaan melalui tahapan, *pendaftaran (P1)*, *pelatihan (P2)*, *pendampingan (P3)*, *perijinan (P4)*, *pemasaran (P5)*, *pelaporan keuangan (P6)* dan *Permodalan (P7)*.

Permasalahan Mitra UKM

Berbagai masalah yang dialami pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Masalah yang dialami pelaku UKM secara umum sebagai berikut:

- Pemasaran online & Photo Produk
- Keuangan/Permodalan
- Pencatatan transaksi keuangan
- Perijinan
- Produk & *Packaging*
- Sumber daya manusia/Tenaga Kerja
- Wawasan lingkungan usaha/*Net working*

Melihat kondisi permasalahan diatas adalah hal yang mendasar yang harus dipenuhi dan dikuasai dalam berwirausaha, tetapi kenyataannya UMKM belum mampu mengembangkan potensi dan perannya secara optimal. Kondisi usaha kecil masih relatif lemah, sebagian masih

terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada. Kondisi yang demikian, disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM. Keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha, modal kerja, serta kelangkaan akan sarana usaha yang dimiliki. (*Mudjiarto, 2013*).

Dengan keterbatasan diatas merupakan permasalahan yang penting bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri oleh UMKM. Dibutuhkan bantuan dari pemerintah dan strategi dalam pemecahan masalah, dan pengembangan potensi dengan pendekatan pembinaan. Dimulai dari memperkokoh motivasi, mentalitas kewirausahaan serta kemandirian, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan manajerial sampai pada penguasaan teknologi. (*Rojuaniah 2014*).

2. *Justifikasi prioritas masalah.*

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sebuah program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) melanjutkan program yang dikenal Ok-Oce. Diharapkan dengan program ini pelatihan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) yang dapat meningkatkan kemampuan pelaku UKM khususnya di DKI Jakarta sehingga mempunyai kemampuan berdaya saing global tidak hanya di tingkat lokal.

Dari *Forum Group Discussion* (FGD), diharapkan juga adanya potensi-potensi lokal yang dapat ditawarkan yang dikemas untuk konsumsi global. Hal ini yang menjadi prioritas masalah yang menjadi kebijakan-kebijakan Pemda DKI untuk membantu UMKM melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). (*Renstra Pemda DKI 2019-24*).

3. Tujuan Program

Tujuan secara umum dari pembinaan UMKM di DKI adalah, bagaimana meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam meningkatkan kinerja usahanya sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang akan dihadapinya. Diharapkan juga dengan peningkatan kinerja dengan predikat **upervi dan mandiri** secara otomatis diharapkan kelancaran pembayaran pinjaman akan terjaga.

Sedangkan tujuan secara khusus, merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum yang ditetapkan yaitu, peningkatan internal dan eksternal uperv berupa:

1. Peningkatan Kemampuan manajemen usaha melalui:

- 1). Pelatihan dan upervise dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran untuk mengarsipkan dokumen dan mencatat usaha baik dari segi keuangan, pemasaran dan produksi.
- 2). Pembentukan wadah kerjasama bisnis sehingga tercipta jejaring dalam mencapai kemajuan upervi.
- 3). Pelatihan dan upervise untuk penguasaan teknologi informasi sehingga mitra dapat memasarkan produk melalui *e marketing*.

2. Tercipta Pola pembinaan UMKM yang terintegrasi melalui:

- 1). Pemberian pinjaman oleh Bank DKI atau lembaga keuangan lainnya harus dikaitkan dengan program PKT yang dilaksanakan.
- 2). Supervisi yang dilakukan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan petugas pendamping dan dilaporkan oleh SKPD menjadi bahan evaluasi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

1. *Kerangka pemikiran*

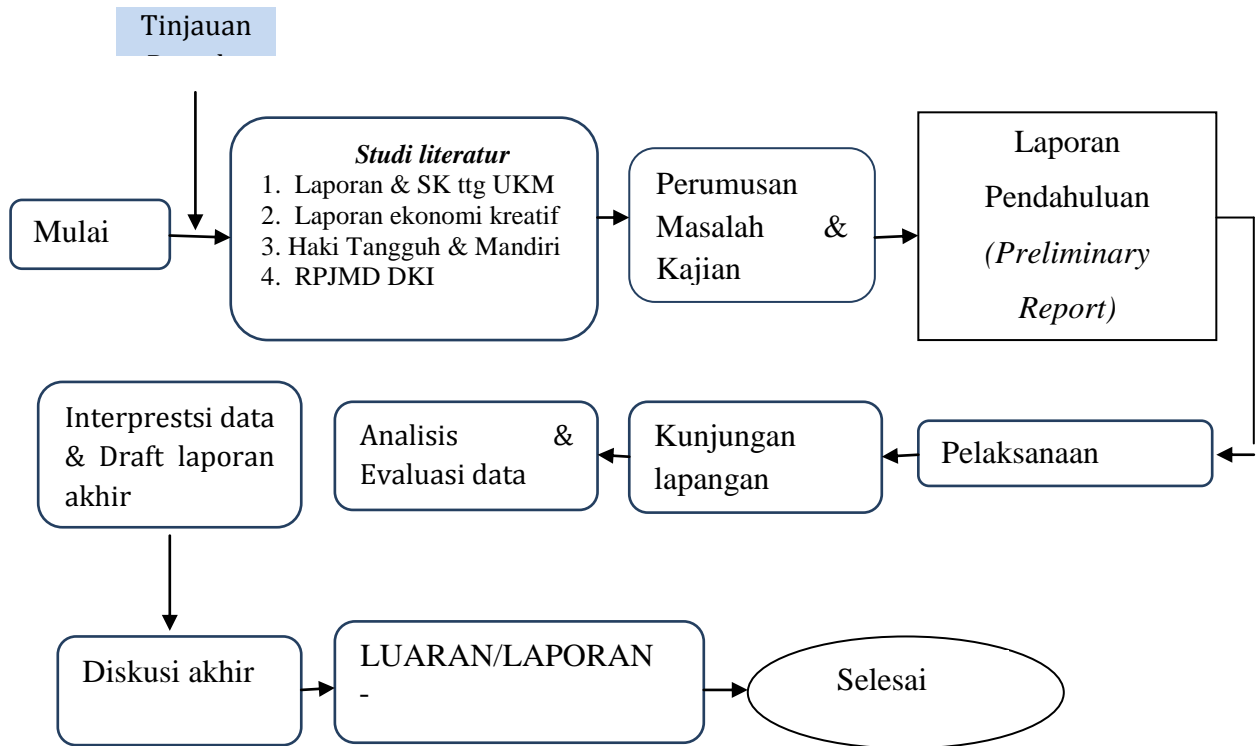
Didasarkan atas instruksi Gubernur DKI No 152 tahun 2017 dan keputusan no 102 tahun 2018, dalam pelaksanaan serta implementasinya perlu di tetapkan kerangka dan alur pemikiran yang merupakan panduan serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Kerangka pemikiran juga dimaksud, untuk pemahaman arti penting kebijakan dan peraturan yang dibuat, sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan yang sama baik individu, kelompok dan organisasi yang berdampak pada efektivitas luaran program yang berkualitas (*Henry Mintzberg, 1999*).

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatifitas dasar kepaduan yang tinggi, baik internal maupun eksternal melalui kerjasama yang dijalin (*Networking*).

2. *Pengumpulan Data & Sumber Informasi*

Pengumpulan data serta sumber informasi dikumpulkan melalui sumber internal (Pemda DKI dan unit-unit kerja) serta sumber eksternal (data statistik /BPS, kementrian-kementrian terkait, BUMN dan Perbankan serta Perguruan Tinggi), baik data primer maupun skunder. Pelaksanaan pekerjaan pengumpulan data dan analisisnya serta luaran yang dihasilkan dijelaskan dalam gambar berikut ini

Gambar 2; Alur Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan analisisnya



3. Alat Pelaksana Kegiatan Pendampingan Tangguh dan Mandiri

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang harus dikuasai penggunaannya, seperti komputer atau notebook/laptop dan lembar isian berupa Form-Form sebagai berikut:

a. Lembar isian Kartu Kendali (Form 1.1 dan 1.2) Lampiran

Merupakan lembar isian yang berperan sebagai KARTU KENDALI dari kegiatan pendampingan. Kartu kendali diisi pada saat hari pertama pertemuan antara pendamping dan UMKM, mendiskusikan pekerjaan yang akan dilakukan selama 12 bulan. *Form 1.1* diisi untuk kegiatan calon wirausaha baru, yang disesuaikan dengan target P2 sampai dengan P7. Sedangkan *Form 1.2* diisi untuk UMKM sudah berjalan atau sudah mencapai P7, pengisiannya disesuaikan dengan target UMKM tangguh dan mandiri.

b. Lembar isian Monitoring dan Evaluasi (Form 2.1 dan 2.2) Lampiran ..

Merupakan lembar isian monitoring dan evaluasi (monev), berperan sebagai evaluasi kemajuan setiap bulannya melalui kegiatan pendampingan dan berpatokan dari kartu kendali yang sudah disepakati. Laporan kegiatan melalui form 2.1 untuk wirausaha baru dan form 2.2 untuk usaha yang sudah berjalan dan di laporkan ke Satpel wilayah melalui google form atau email.

c. Lembar isian Kinerja Usaha (Form 3) Lampiran ..

Merupakan lembar isian kinerja usaha UMKM, yang dibuat setiap 3 bulan satu kali. Penilaian Mandiri, data diisi dari form 2.2 dihitung berdasarkan formula yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian tangguh diperoleh dari pengamatan langsung dari variabel kontinuitas usaha dan kemampuan memperoleh laba (*Profit Margin*). Hal dapat

dilihat pada uraian *e. Pedoman dan Pola Penilaian Kinerja Wirausaha (UMKM)*.

Lembar isian form 3 diserahkan ke Satpel setiap tiga (3) bulan sekali.

d. Lembar Isian Rekap Hasil Kemajuan (Form 4) Lampiran ..

Merupakan lembar isian berupa rekap kemajuan dari UMKM yang menjadi binaan pendamping, sumber data dari form-form yang sudah diisi sebelumnya. Form 4 diserahkan setiap 3 bulan bersamaan dengan *form 3*.

e. Pedoman dan Pola Penilaian Kinerja Wirausaha (UMKM)

- Pelaksana Tugas : Pendamping (Supervisor)
- Penanggung jawab langsung : Satpel Wilayah
- Lampiran Form : 1.2, 2.2, 3 & 4
- Dilindungi hak cipta : Haki 067741

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kajian

Hasil dari kajian di lapangan, melalui *Forum Group Discussion (FGD)* diketahui Keberadaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UKM) dalam perekonomian Indonesia mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral. Beberapa peran strategi usaha kecil menengah adalah, ikut serta dalam proses pemerataan pembangunan Ekonomi, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan berusaha serta menciptakan dan memperluas lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Data statistik kemenkop menunjukkan tahun 2009 golongan usaha besar terdapat 4.952 unit usaha, menengah (sedang) 44.280 unit usaha, kecil 602.195 unit usaha, sedangkan usaha kecil mikro menciptakan 54.559.000 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM sebesar 107.65 juta atau sebesar 97.24% dari total tenaga kerja. *Kemenkop "Peran KUKM dalam perekonomian Indonesia" Harian Kompas, 29 Agustus 2014.*

Tetapi kenyataannya usaha kecil itu belum mampu mengembangkan potensi dan perannya secara optimal. Kondisi usaha kecil masih relatif lemah, sebagian masih terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada.

Kondisi yang demikian, disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM. Keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha, modal kerja, serta kelangkaan akan sarana usaha yang dimiliki. *(Mudjiarto, 2013).*

Dengan keterbatasan diatas merupakan permasalahan yang penting bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri oleh UMKM. Dibutuhkan bantuan dari pemerintah dan strategi dalam pemecahan masalah, dan

pengembangan potensi dengan pendekatan pembinaan. Dimulai dari memperkokoh motivasi, mentalitas kewirausahaan serta kemandirian, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan manajerial sampai pada penguasaan teknologi. *(Rojuaniah 2014)*.

Dalam rangka membantu UMKM, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas untuk melaksanakan pembinaan UMKM dilingkungan operasionalnya. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 74), ataupun Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (pasal 17, 25, dan 34), mewajibkan perusahaan ataupun penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan dan peraturan pemerintah tentang Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan (PKBL) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengharuskan BUMN menyisihkan laba bersihnya untuk membantu UMKM. Diberlakukan sejak tahun 2003 sebesar 1% (No: Kep-236/MBU/2003), dan berubah menjadi 2 % pada tahun 2007 (No: Per-05/MBU/2007).

Pendekatan pembinaan yang dilakukan BUMN terdiri dari, bantuan modal usaha, program pelatihan manajemen usaha, pembinaan lapangan (supervisi), dan pameran. Pelaksanaan kegiatan diharuskan melalui pihak ke tiga diutamakan dari kalangan Perguruan Tinggi. Untuk mencapai tepat sasaran serta peningkatan kualitas pembinaan dari hasil yang dicapai, diperlukan pedoman-pedoman yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta masukan-masukan dari pelaksanaan program sebelumnya, dengan demikian kegiatan pembinaan pelatihan dan supervisi direncanakan dengan terintegrasi satu dengan yang lain. Prinsip integrasi pembinaan yang dimaksud, dimulai dari persiapan pelatihan, pemberian pinjaman sampai dengan monitoring dan pameran harus terstruktur dan terintegrasi melalui 3 proses yaitu: Rekrutmen & seleksi calon mitra, pelatihan, monitoring dan evaluasi, *(Mudjiarto, Haki 2014)*.

Dengan demikian materi pelatihan dan supervisi yang disusun dapat memenuhi kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Mulai dari indentifikasi penentuan kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan pelatihan sampai evaluasi pelatihan hal ini menjadi suatu dasar dalam menentukan prinsip belajar yang ingin dicapai (*Miner 2002*). Prinsip belajar yang dikemukakan *Miner* tersebut terdiri dari 6 (enam) tahapan proses yaitu,

1. Penentuan kebutuhan

Kebutuhan pelatihan sangat perlu dianalisis dgn cermat & tepat. Analisis ini harus mampu mendiagnosis dua (2) hal yang harus diperhatikan,

- 1) Peserta harus dapat memecahkan masalah-masalah usaha atau pekerjaan yg dihadapi
- 2) Peserta dapat menghadapi tantangan masalah dimasa yang akan datang

2. Penentuan sasaran

Sasaran yg dicapai bisa bersifat :

- 1) Teknikal
- 2) Keperilakuan/motivasi
- 3) Atau kedua-duanya

3. Sasaran berguna bagi penyelenggara untuk:

- 1) Sebagai tolak ukur keberhasilan program
- 2) Sebagai bahan utk menentukan program berikut (isi program)

4. Penentuan Isi Program

Penentuan isi Program berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Isi Program harus sejalan & seiring dengan sasaran & tujuannya

5. Identifikasi Prinsip Belajar

Prinsip belajar yg selalu hrs dianalisis & dievaluasi serta dipertimbangkan, ada 4 hal sebagai berikut:

- 1) Partisipasi
- 2) Repetisi
- 3) Relevansi
- 4) Pengalihan & umpan balik

6. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program dilihat dari teknik-teknik pelatihan & pengembangan sebagai berikut:

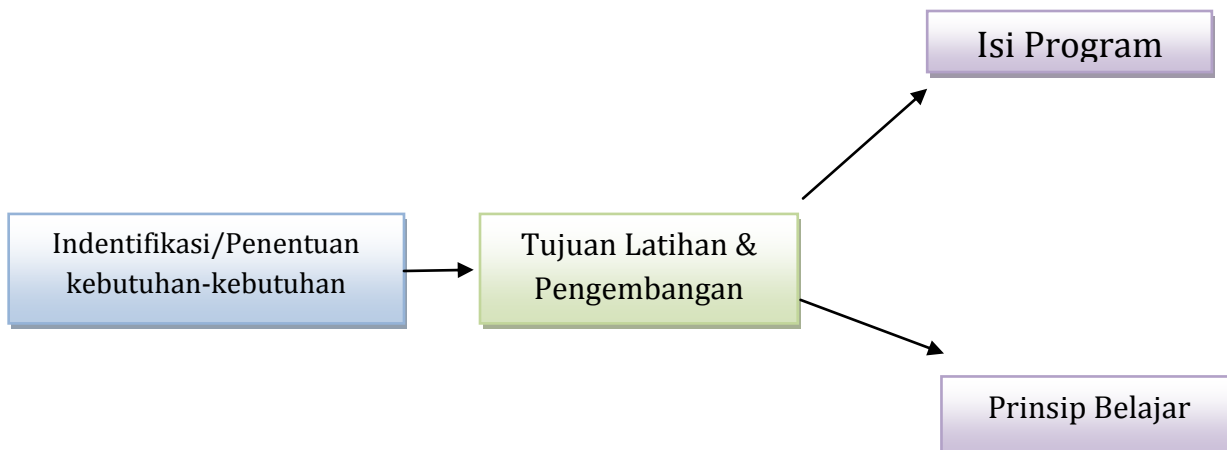
1) On the Job

- Instruksi kerja/usaha
- Rotasi Jabatan
- Pemberian Petunjuk
- Pemagangan di tempat kerja/usaha

2). Of the job

- Teknik pemberian informasi keahlian pekerjaan dan usaha melalui Modul-modul, Presentasi Video, Kuliah dan lain lain
- Program perubahan perilaku, study kasus, laboratorium dan lain lain.

Dari enam (6) tahapan dapat digambarkan sebagai berikut:



PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM dapat diidentifikasi. Identifikasi permasalahan menjadi satu acuan dalam metode pelaksanaan program yang akan disusun. Dari analisis situasi, indentifikasi masalah dapat dibagi dua (2) yaitu, *internal dan eksternal faktor*. Permasalahan *internal* berkaitan kemampuan UMKM sendiri. Sedangkan masalah *eksternal* berkaitan dengan persaingan usaha (*competitive advantage*) kaitannya dengan perdagangan bebas ACFTA dan AFTA.

Internal faktor.

1. Kemampuan manajemen usaha mitra.
 - 1). Masih rendah kemampuan dan kesadaran untuk mengarsipkan dokumen dan mencatat transaksi usaha baik dari segi keuangan, pemasaran dan produksi
 - 2). Masih rendah kesadaran akan kerjasama antar mitra dan arti pentingnya pembentukan jejaring (*net working*).
 - 3). Masih rendah penguasaan teknologi informasi untuk usaha.
2. Pola Pembinaan UMKM tidak terintegrasi.
 - 1). Pemberian pinjaman tidak dikaitkan dengan program pelatihan manajemen usaha, sehingga peserta pelatihan banyak yang diwakilkan
 - 2). Supervisi yang dilakukan pihak ke 3 (Perguruan Tinggi), tidak sebagai pedoman dan acuan dalam monitoring yang dilakukan petugas lapangan PKBL
 - 3). Adanya perbedaan pelaksanaan kegiatan di masing-masing BUMN, walaupun dengan peraturan dan perundang-undangan yang sama.

Ekternal Faktor

1. Diberlakukan perdagangan bebas dengan China (ACFTA) dan ASEAN (AFTA), hal ini mengakibatkan penurunan omset penjualan dan adanya mitra UMKM beralih usaha dari produksi menjadi pedagang
2. Kurangnya informasi yang sampai ke UMKM melalui media masa masyarakat yang terjangkau, tentang program-program dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. (program peningkatan kompetensi) baik produk maupun manusianya, contoh; pentingnya pengurusan SNI dan HaKI serta kompetensi tenaga kerja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berberapa kesimpulan dari pelaksanaan pembinaan UKM mitra binaan sebagai berikut:

1. Pendekatan pembinaan yang dilakukan terdiri dari, bantuan modal usaha, program pelatihan manajemen usaha, pembinaan lapangan (supervisi), dan pameran. Untuk mencapai tepat sasaran serta peningkatan kualitas pembinaan dari hasil yang dicapai, diperlukan pedoman-pedoman yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta masukan-masukan dari pelaksanaan program sebelumnya.
2. Hasil pembinaan menunjukkan bahwa manfaat Program kemitraan bukan hanya terletak pada besarnya jumlah pinjaman yang diberikan serta pelatihan yang dilakukan. Tetapi bagaimana memberikan wawasan bisnis dan motivasi usaha yang disampaikan secara kontinyu melalui supervisi yang dilakukan. Supervisi pertama, dilaksanakan dua bulan setelah diberikan pelatihan dan pinjaman. Hasil yang ditunjukkan, tidak mengalami peningkatan yang diinginkan dari lima indikator yang diamati. Namun mulai supervisi ke dua sampai dengan ke tiga terlihat adanya kemajuan yang berarti dalam pengelolaan usaha dan wawasan bisnis.

2. Saran-Saran

Dari pelaksanaan pelatihan dan supervisi serta saran-saran peserta, maka beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan program pembinaan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran yang maksimal dalam Program Pembinaan, seluruh pembina (petugas lapangan) mitra binaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, diberikan pelatihan berkaitan dengan pengaruh perdagangan bebas dengan produk-produk UKM yang menjadi binaannya.

Hal tersebut diperlukan agar mitra binaan mendapatkan masukan dan informasi mengenai tata strategi usaha mulai dari pemasaran sampai strategi pembiayaan.

2. Berdasarkan hasil angket yang kami terima dan beberapa masukan dari peserta, yang merupakan rekomendasi untuk pelaksanaan program pembinaan berikutnya antara lain :
 - a. Diperlukan pelatihan lanjutan untuk program pembinaan berikutnya, berupa kunjungan lapangan dan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan oleh mitra.
 - b. Jadwal pelatihan disarankan tidak terlalu padat, diperlukan penambahan waktu per materinya.
 - c. Diperlukan pelatihan dengan materi keterampilan khusus dalam usaha, berupa keterampilan teknis antara lain : desain produk, , tata cara ekspor (manajemen ekspor), dan lain-lain.
3. Dalam pelatihan sebaiknya setiap mitra yang hadir membawa contoh usahanya. Agar dapat langsung mengadakan pameran sebagai sarana temu bisnis dengan mitra lainnya.
4. Pelatihan hendaknya dilaksanakan dengan peserta yang mempunyai usaha sama atau sejenis, sehingga penyelenggara dapat menyajikan materi sesuai dengan bidang usahanya.
5. Bila dimungkinkan dijadwalkan 1 hari untuk berkunjung (studi banding) ke tempat Peserta (Usahawan) dalam mengetahui usaha-usaha yang dijalankan, atau ke tempat-tempat usaha yang menjadi percontohan.
6. Bila memungkinkan dalam acara Temu Bisnis dan Diskusi Kelompok dihadirkan adanya nara sumber dan Investor.

7. Melihat kondisi UMKM diatas, maka untuk menghadapi perdagangan bebas AFCTA dan AFTA sangat diperlukan pembinaan secara langsung atau supervisi (pembinaan lapangan) yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dale Timpe.** 1988. *The Art Science of Business Management Performance*. New York: Kendall Publishing Inc
- Buchari Alma. 2005. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta. J
- _____. 2004. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Drucker, Peter F. 1991.** *Inovasi dan Kewiraswastaan; Praktik dan Dasar-dasar*, diterjemahkan oleh Rusjdi Naib. Jakarta: Erlangga.
- Justin G. Longenecker. 2000.** *Small Business Management*. Southwestern College Publishing.
- Kao, Raymond Russel M. Knight. 1987.** *Entrepreneurship and New Venture Management*. Toronto: Prentice-Hal Canada. Scarborough.
- Kotler, Philip 1997.** *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Prehallindo.
- _____. 1997. *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control*. Ninth edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc..
- Masykur, Wiratmo .1996.** *Pengantar Kewiraswastaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Meredith, Geoffrey G. et. Al. Tanpa Tahun.** *Kewirausahaan; Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Andre Asparsayogi. Jakarta.
- Miner, John B. 1988,** *Organizational Behavior Performance and Productivity*, first Edition. copyright @ 1988 by Random House, Inc.
- Mudjiarto, 2009.** *Kewirausahaan (Motivasi dan Prestasi Dalam Karier Wirausaha)*, UIEU – University Press
- , **2006** *Membangun karakter & kepribadian kewirausahaan*. Graha Ilmu, ISBN-10: 979-755-176-7

-----, **2014**, *Simonev Tangguh & Mandiri-Pedoman Pendampingan Kemitraan bagi penyelenggaraan CSR di BUMN & Perusahaan Swasta*. KemenhumHam No 067741

Robert L. Craig. Tanpa Tahun. *Editor and Chief Training and Development Handbook*, I thirddedition, McGraw-Hill Book Company.

Robbin, Stephen P. 1996. *Organizational Behavior New Jersey*: PrenticeHall, Inc. International Edition.

Suharsimi Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian* .Jakarta: Diknas.

Sutermeister, Robert A.. 1990*People and productivity New York*: McGrawhil| Book Comp.,Inc.

Suryana, 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Empat Salemba.

Stphen. R. Covey. Tanpa Tahun. *Tujuh Kebiasaan Manusia yang sangat Efektif AlihBahasa*.